

# STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MUHAMMAD KEMAL

NPP. 32.0762

Asdaf Kota Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Administasi Pemerintahan Daerah

Email: mkemal646@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Lina Marlina, S.Pd, M.Si

## ABSTRACT

**(Problem Statement/Background (GAP):** The management of Minimum Service Standards (SPM) in the public works and spatial planning sector in Hulu Sungai Tengah Regency faces significant challenges. These include the underachievement of SPM targets, issues in coordination across departments, and limited public awareness regarding the importance of infrastructure services like clean water and sanitation. Data from the e-SPM application shows that the SPM achievement for public works in 2023 was only 66.54%, far from the 100% target. This highlights inefficiencies that limit the district's capacity to improve public services and overall fiscal health. **Purpose:** This study aims to analyze the strategies employed by the Department of Public Works and Spatial Planning in Hulu Sungai Tengah Regency to optimize the achievement of Minimum Service Standards (SPM) in the public works and spatial planning sectors. **Method:** The research employs a descriptive qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, document reviews, and field observations with key informants from the Department of Public Works and Spatial Planning and other relevant stakeholders. The analysis is guided by Richard Rumelt's strategic management framework, which includes diagnosis, guiding policy, and coherent actions.. **Result:** The study found that although efforts to optimize SPM achievement have been made, several significant obstacles remain. These include inadequate asset utilization, limited public awareness, poor inter-agency coordination, and insufficient human resources. However, there are promising efforts such as the implementation of targeted socialization programs, the formation of coordination forums, and the enhancement of employee capacity through training. These initiatives indicate a step forward toward improving SPM achievement in the region. **Conclusion:** The management of Minimum Service Standards in the public works and spatial planning sector in Hulu Sungai Tengah remains suboptimal, with several challenges hindering the full achievement of SPM targets. However, strategic initiatives such as improved coordination and capacity building show potential for future improvements in service delivery and overall public sector efficiency. **Keywords:** Fiscal Efficiency, Hulu Sungai Tengah, Local Revenue (PAD), Minimum Service Standards (SPM), Public Works, Spatial Planning, Strategy.

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghadapi tantangan besar. Isu utama meliputi pencapaian SPM yang belum optimal, masalah koordinasi antarinstansi, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya layanan infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi. Data dari aplikasi e-SPM menunjukkan bahwa capaian SPM untuk pekerjaan umum pada tahun 2023 hanya mencapai 66,54%, jauh dari target 100%. Hal ini menunjukkan inefisiensi yang membatasi kemampuan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesehatan fiskal secara keseluruhan.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengoptimalkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kajian dokumen, dan observasi lapangan dengan informan kunci dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta pemangku kepentingan terkait. Analisis data dilakukan berdasarkan kerangka manajemen strategi dari Richard Rumelt yang mencakup diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren.

**Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan pencapaian SPM, masih ada beberapa hambatan signifikan. Hambatan utama meliputi pemahaman masyarakat yang terbatas, kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, dan pemanfaatan aset yang belum optimal. Namun, inisiatif seperti sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan forum koordinasi, dan peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang menjanjikan. **Kesimpulan:** Pengelolaan Standar Pelayanan Minimal di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum optimal, dengan tantangan-tantangan besar yang menghambat pencapaian target SPM secara penuh. Namun, inisiatif strategis yang sedang dijalankan menunjukkan potensi untuk perbaikan di masa depan dalam pelayanan publik dan efisiensi sektor pemerintahan.

**Kata kunci:** Hulu Sungai Tengah, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pemerintahan Daerah, Standar Pelayanan Minimal, Strategi.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Permasalahan pelayanan di Indonesia masih menjadi tugas berat yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada saat ini dinilai masih rendah. Secara umum, pelayanan publik di Indonesia dianggap masih jauh dari prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal. Ini adalah masalah besar yang sudah berlangsung lama dan masih menjadi isu penting yang harus diatasi oleh setiap pemerintahan.

Pada dasarnya, pelayanan publik merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik. (Tasatanattakool *et al* 2025). Pelayanan publik ini mencakup segala bentuk layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, atau oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dalam bentuk barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Hanafi, 2020). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan publik juga menjadi salah satu indikator utama untuk Peningkatan kapasitas dan pengelolaan yang lebih terorganisir dapat mempercepat pemanfaatan aset (Lazoglu & Karabey, 2025) kualitas administrasi pemerintahan. Pemberian pelayanan publik merupakan cara untuk melihat seberapa baik pemerintah dalam memenuhi tuntutan, kebutuhan, dan harapan masyarakat. (Morte & Navarro ,2025) Oleh karena itu, sebagai penyelenggara pelayanan publik, pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan yang berkualitas.

Pelayanan yang berkualitas tinggi juga dikenal sebagai pelayanan prima, yang berarti pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Mao, Z., & Zhu, Y. ,2025)

Secara umum, pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Hak-hak yang dimaksud terutama adalah hak-hak dasar, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus memprioritaskan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan sosial.

Untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut, pemerintah daerah di Indonesia mengatur pelaksanaan pelayanan publik melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pelayanan dasar yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. SPM bertujuan untuk memberikan kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas pelayanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (DENG, 2025)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, terdapat enam urusan yang harus dilayani oleh pemerintah daerah, yang dibagi menjadi 29 jenis pelayanan dasar.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, seperti halnya instansi pemerintah lainnya di pusat dan daerah, berupaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima dengan menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan potensi dan permasalahan setempat. Setiap tahun, setelah penerapan SPM, dilakukan evaluasi untuk menilai hasil capaian dan kendala yang dihadapi, termasuk dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan laporan penerapan SPM yang disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ditemukan bahwa capaian SPM pada tahun 2023 mencapai 87,7%, dengan bidang Pekerjaan Umum menjadi salah satu yang memiliki capaian terendah, yaitu hanya 66,54%, jauh di bawah target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar di bidang Pekerjaan Umum masih perlu diperbaiki, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan pengelolaan sanitasi lingkungan.

Permasalahan ini semakin kompleks dengan kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang meliputi wilayah perbukitan dan permukiman terpencil, yang memperburuk distribusi pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat agar upaya perbaikan pelayanan publik dapat tercapai dengan maksimal. Hadi Prabowo (2022) menyatakan bahwa sistem pelayanan publik yang terintegrasi dapat menjadi benteng dalam mencegah maladministrasi dan mempercepat proses pelayanan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi dalam mengoptimalkan capaian Standar Pelayanan Minimal di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan latar belakang tersebut, penulis memilih untuk meneliti “Strategi Optimalisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.”

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Indonesia telah menjadi kebijakan strategis dalam rangka memastikan bahwa pelayanan dasar yang berkualitas dapat diberikan kepada masyarakat. Namun, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian SPM di tingkat pemerintah daerah masih sangat bervariasi dan banyak daerah, termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menghadapi kendala serius, khususnya dalam sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Berdasarkan Laporan Penerapan SPM 2023, sektor Pekerjaan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya mencapai 66,54% dari target yang ditetapkan, jauh di bawah angka yang diharapkan yaitu 100%. Hasil ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara target kebijakan dan pencapaian di lapangan.

Kesenjangan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah minimnya kajian empiris yang mendalam mengenai penguatan tata kelola SPM, terutama di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada tingkat pemerintah daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada evaluasi umum SPM, studi literatur, atau menggunakan model evaluasi yang lebih sempit yang tidak menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian ini menyadari bahwa kajian terdahulu cenderung mengabaikan konteks daerah menengah seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang memiliki karakteristik dan tantangan unik dalam implementasi SPM.

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Mardianingsih et al. (2020) dan Gaffar et al. (2024) lebih menitikberatkan pada evaluasi SPM sektor kesehatan dan pendidikan, namun tidak banyak menyinggung secara detail integrasi antara perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, serta koordinasi antar instansi dalam implementasi SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini menciptakan celah dalam pemahaman yang menyeluruh terhadap bagaimana tata kelola SPM dapat diperkuat secara efektif, khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur dasar dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di daerah.

Kesenjangan lain yang perlu dicatat adalah kurangnya studi yang menggabungkan teori-teori manajerial dan kebijakan publik dalam implementasi SPM secara menyeluruh. Penelitian ini berfokus pada pengintegrasian perencanaan strategis, teknologi informasi, dan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang merupakan area yang masih terbatas dalam kajian terdahulu. Berbeda dengan itu, penelitian ini memperkenalkan kerangka yang lebih komprehensif dalam penguatan tata kelola SPM, yang melibatkan transformasi sosial, keterlibatan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya manusia secara lebih integratif.

Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengkaji secara langsung peran aktif instansi daerah, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam mengelola dan mengimplementasikan SPM secara menyeluruh. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi, memberikan gambaran yang lebih valid dan komprehensif mengenai tantangan dan peluang penguatan tata kelola SPM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi yang strategis dan relevan karena mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan antara studi teoretis dan praktik nyata di lapangan, khususnya pada domain tata kelola SPM di daerah menengah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam pengembangan strategi penguatan SPM

yang lebih terintegrasi, kontekstual, dan berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta pemerintah daerah lainnya yang menghadapi tantangan serupa dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### 1.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai sektor telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami implementasi dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Dalam bidang kesehatan, Adhi & Ningsih (2020) dalam penelitian mereka yang berjudul Manajemen Data Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit berfokus pada pengelolaan data dan strategi implementasi SPM di rumah sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi cara rumah sakit mengelola dan melaporkan data terkait dengan pelayanan minimal yang diberikan kepada pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan operasional yang dihadapi oleh rumah sakit dalam memenuhi standar pelayanan dan bagaimana data dapat digunakan untuk memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Di sektor pendidikan, Kalele *et al*, (2023) melalui penelitian mereka yang berjudul Efektivitas Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program pendidikan dengan fokus pada efektivitas kebijakan SPM di provinsi tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap para pelaksana kebijakan dan penerima layanan. Mereka memfokuskan perhatian pada peran pengawasan, penetapan sasaran, dan koordinasi antar instansi dalam memastikan bahwa SPM pendidikan dilaksanakan secara efektif, dengan penekanan pada kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Asyulia & Priyo Hastono (2023) berjudul Determinan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelayanan Kesehatan Orang Berisiko Terkena HIV dengan Pendekatan Malcolm Baldrige di Puskesmas Kota Depok bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Mereka menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige yang berfokus pada enam kriteria utama dalam penilaian kinerja, yaitu kepemimpinan, perencanaan strategis, fokus pada pelanggan, pengukuran dan analisis, manajemen pengetahuan, serta manajemen proses. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data univariat dan multivariat untuk mengidentifikasi variabel mana yang paling dominan mempengaruhi capaian SPM di puskesmas.

Di RSUD Manokwari, Mardianingsih *et al* (2020) melakukan penelitian berjudul Capaian Standar Pelayanan Minimal Gizi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pencapaian SPM gizi di rumah sakit tersebut, dengan fokus pada tiga indikator utama: ketepatan waktu distribusi makanan, sisa makanan pasien, dan ketepatan pemberian diet. Mereka menggunakan metode kuantitatif dengan observasi lapangan dan penimbangan sisa makanan, serta menganalisis data kuesioner yang diberikan kepada tenaga medis dan pasien. Penelitian ini juga menilai faktor-faktor yang menghambat pencapaian standar tersebut, termasuk kurangnya sumber daya manusia, pengawasan yang tidak maksimal, dan fasilitas yang kurang memadai.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Kusuma *et al* (2024) berjudul Implementasi Kebijakan dan Capaian Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa), menggunakan pendekatan

kualitatif studi kasus untuk mengeksplorasi tantangan dalam penerapan SPM pendidikan di daerah tersebut. Penelitian ini berfokus pada pengaruh anggaran, koordinasi antar lembaga, dan ketersediaan fasilitas terhadap pencapaian standar pelayanan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan termasuk wawancara mendalam, observasi partisipan, dan analisis dokumen untuk menggali lebih dalam tentang hambatan-hambatan implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang memperlancar proses penerapan kebijakan ini.

Penelitian oleh Gaffar *et al* (2024) berjudul Capaian Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penderita Diabetes Mellitus di RSUD Otanaha Kota Gorontalo fokus pada penerapan SPM kesehatan khususnya untuk penderita diabetes mellitus di rumah sakit tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan wawancara mendalam dan observasi untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan SPM diterapkan di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, termasuk komunikasi antar organisasi pelaksana, peran tenaga medis, dan fasilitas yang tersedia untuk penderita diabetes mellitus.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini dengan jelas menawarkan kebaruan ilmiah yang membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat pemerintahan daerah. Jika kita menilik penelitian-penelitian terdahulu, banyak yang terfokus pada spesialisasi sektor seperti kesehatan dan pendidikan, dengan menggunakan pendekatan yang lebih sempit dan terbatas. Berbeda dengan itu, penelitian ini mengangkat aspek yang lebih luas dan strategis, dengan pendekatan yang menantang cara lama dalam menyelesaikan tantangan implementasi SPM yang masih dihadapi di daerah. Kebaruan utama terletak pada bagaimana penelitian ini menggabungkan strategi manajerial yang solid dengan pendekatan digitalisasi untuk mengatasi masalah praktis yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan SPM.

Menariknya, penelitian Adhi & Ningsih (2020) yang berfokus pada manajemen data SPM di rumah sakit, meskipun memberikan gambaran penting mengenai pengelolaan data di sektor kesehatan, tidak melibatkan aspek yang lebih besar dalam pengelolaan SPM yang berbasis pada pemerintahan daerah. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pengelolaan dan pelaporan data yang bersifat teknis dan terbatas pada sektor pelayanan rumah sakit saja. Sebaliknya, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan memfokuskan perhatian pada penguatan koordinasi antar instansi dan implementasi SPM yang lebih holistik, dengan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sering terabaikan. Hal ini menjadikan penelitian ini lebih aplikatif dan relevan untuk perbaikan sistem tata kelola pemerintahan di daerah, khususnya dalam penerapan SPM secara menyeluruh.

Begitu pula dengan penelitian Kalele *et al.* (2023) yang mengevaluasi efektivitas SPM pendidikan di Sulawesi Utara. Meskipun penelitian tersebut memberikan kontribusi signifikan dalam menilai penerapan SPM di sektor pendidikan, fokus utamanya masih terbatas pada peran pengawasan dan sumber daya manusia di sektor pendidikan. Berbeda dengan itu, penelitian ini menggabungkan teori strategi Janowski yang lebih komprehensif, yang menilai tidak hanya digitalisasi, tetapi juga transformasi sosial, keterlibatan masyarakat, dan konteks lokal yang seringkali terabaikan dalam penelitian terdahulu. Penelitian ini memandang tata kelola SPM secara menyeluruh, yang berfokus pada pembangunan sistem pemerintahan yang modern dan berkelanjutan, serta kolaborasi antar instansi pemerintah untuk memastikan tercapainya standar

pelayanan publik yang prima.

Penelitian Asyulia & Priyo Hastono (2023) mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi capaian SPM kesehatan dengan menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige, yang berfokus pada enam kriteria utama dalam penilaian kinerja, seperti kepemimpinan, perencanaan strategis, dan pengukuran kinerja. Namun, meskipun pendekatan Malcolm Baldrige sangat mendalam di sektor kesehatan, penelitian ini tidak mengintegrasikan aspek teknologi yang menjadi tantangan besar dalam penerapan SPM di daerah. Penelitian ini, di sisi lain, menggabungkan tiga aspek penting dalam tata kelola SPM—perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta penyelenggaraan pemerintahan—sehingga memberikan solusi yang lebih terintegrasi dan aplikatif dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tidak terbatas pada sektor kesehatan saja.

Sedangkan penelitian Mardianingsih et al. (2020) berfokus pada capaian SPM gizi di RSUD Manokwari, dengan menilai ketepatan waktu distribusi makanan dan pengelolaan sumber daya manusia. Meski demikian, penelitian ini terbatas pada sektor kesehatan, tanpa memberikan gambaran tentang pengaruh teknologi dan penerapan SPM dalam pelayanan publik yang lebih luas. Sebaliknya, penelitian ini menggabungkan pendekatan digitalisasi dalam pelayanan umum, yang mengarah pada penguatan sistem governance berbasis elektronik yang mempengaruhi tidak hanya sektor kesehatan tetapi juga sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang memiliki tantangan lebih besar dalam mencapai SPM yang optimal di daerah.

Kusuma et al. (2024) lebih fokus pada tantangan dalam penerapan SPM pendidikan di Kabupaten Sumbawa yang berkaitan dengan anggaran, koordinasi antar lembaga, dan fasilitas pendidikan. Penelitian ini cenderung mengidentifikasi hambatan-hambatan makro dalam implementasi SPM di sektor pendidikan. Berbeda dengan itu, penelitian ini memfokuskan pada tata kelola SPM yang menekankan pada pembangunan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan optimalisasi teknologi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, yang dapat diaplikasikan untuk berbagai sektor, tidak terbatas pada pendidikan saja.

Penelitian Gaffar et al. (2024) mengenai penerapan SPM kesehatan untuk penderita Diabetes Mellitus di RSUD Otanaha Kota Gorontalo berfokus pada kinerja tenaga medis dan fasilitas kesehatan. Walaupun sangat relevan dalam konteks SPM kesehatan, penelitian ini tidak mengkaji integrasi teknologi digital dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Sebaliknya, penelitian ini melihat SPM sebagai kunci untuk mengatasi hambatan dalam pelayanan kesehatan, serta mengoptimalkan koordinasi antar lembaga untuk mencapai SPM yang lebih baik di berbagai sektor pelayanan publik.

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan SPM, teknologi informasi, perencanaan strategis, dan kolaborasi antarinstansi. Fokusnya yang lebih luas pada tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk memperkuat pelayanan publik menjadi solusi yang lebih aplikatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih fokus pada sektor tertentu atau menggunakan pendekatan terbatas, penelitian ini memandang SPM secara menyeluruh dan menawarkan strategi implementasi yang lebih terintegrasi dan relevan bagi penguatan pelayanan publik di Indonesia.

### 1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam mengoptimalkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang

## II. METODE

Pendekatan Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali secara mendalam dinamika penguatan domain tata kelola dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk faktor penguatan dan hambatan dalam pengelolaan tata kelola SPM serta menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi faktual di lapangan, proses sosial yang berlangsung, serta persepsi masyarakat terhadap kebijakan penguatan tata kelola SPM yang dinilai membawa dampak signifikan terhadap tata kelola pemerintahan daerah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta beberapa wilayah perangkat daerah dan komunitas yang terlibat langsung dalam implementasi SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan mengunjungi lokasi-lokasi tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih representatif mengenai kondisi nyata di lapangan serta tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah dan masyarakat dalam proses penguatan tata kelola SPM.

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan, yaitu dari tanggal 6 hingga 25 Januari 2025, memberikan waktu yang cukup bagi peneliti untuk melakukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi yang dibutuhkan guna memperoleh data yang valid, komprehensif, dan mendalam.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara menyeluruh dinamika sosial yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, termasuk interaksi antara perangkat daerah serta antara pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan tata kelola SPM. Metode ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial yang terjadi selama proses penelitian. Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42), pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami dengan peneliti sebagai instrumen utama. Hal ini sejalan dengan pendapat Simangunsong (2017:190) yang menyatakan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif dapat beradaptasi dengan perubahan informasi yang terjadi di lapangan, sehingga relevan digunakan dalam studi sosial dinamis seperti tata kelola pemerintahan.

Penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan tingkat relevansi dan keterlibatan mereka dalam isu penguatan tata kelola SPM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Informan utama meliputi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pejabat yang menangani bidang pengembangan SPM, tokoh masyarakat lokal, serta staf teknis perangkat daerah yang berperan dalam layanan publik. Pemilihan informan dilakukan karena mereka memiliki informasi kunci baik dari sisi kebijakan maupun dari perspektif teknis dan sosial di tingkat akar rumput.

Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan secara selektif, yakni mereka yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam isu

penguatan tata kelola SPM. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan format semi-terstruktur agar memungkinkan eksplorasi naratif dari para informan. Selain itu, observasi lapangan dilakukan di beberapa titik strategis seperti unit kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta perangkat daerah yang menggunakan aplikasi SPM untuk mengamati praktik dan kendala yang muncul. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data sekunder melalui arsip kebijakan, laporan evaluasi, serta data pendukung lainnya.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi penting yang relevan dengan fokus penguatan tata kelola SPM. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi analitis dan matriks temuan. Kesimpulan ditarik secara bertahap dengan melakukan verifikasi silang terhadap temuan lapangan dan dokumen yang diperoleh. Teknik ini dipilih karena mampu mengorganisasi data sosial yang kompleks secara sistematis, serta memungkinkan peneliti untuk membangun pemahaman yang utuh terhadap dinamika penguatan tata kelola SPM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **STRATEGI OPTIMALISASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah memegang peran kunci dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, khususnya dalam sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. Berdasarkan data yang ada, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tahun 2023 menunjukkan angka yang masih rendah, dengan pencapaian sektor Pekerjaan Umum hanya mencapai 66,54% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan serius dalam pencapaian SPM di sektor ini, yang membutuhkan perhatian dan tindakan yang lebih terstruktur serta strategis.

Optimalisasi pelaksanaan SPM di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi sangat penting untuk mencapai target 100% yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Optimalisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Dantzig (1963), adalah proses pencarian solusi terbaik dalam suatu sistem yang memiliki batasan tertentu, dengan tujuan mencapai hasil maksimal dari fungsi objektif yang ada. Oleh karena itu, untuk mencapai hasil optimal, diperlukan strategi yang baik dan efektif dalam implementasi SPM.

Dalam konteks ini, strategi yang dikembangkan oleh Richard P. Rumelt (2011) dalam teori strategi menjadi dasar dalam merumuskan strategi optimalisasi SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Rumelt menyatakan bahwa strategi yang efektif terdiri dari tiga elemen utama: Diagnosis masalah, Guiding Policy (Kebijakan Penuntun), dan Coherent Action (Tindakan Koheren). Ketiga dimensi ini akan dianalisis lebih lanjut untuk melihat sejauh mana strategi yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat mengoptimalkan pencapaian SPM di sektor pekerjaan umum dan penataan ruang.

### **3.1. Diagnosis / Identifikasi Masalah**

Diagnosis masalah adalah langkah pertama yang penting dalam strategi yang baik. Dalam konteks ini, diagnosis masalah berfungsi untuk mengenali hambatan utama yang menghalangi pencapaian SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Proses ini tidak hanya mengenali masalah yang tampak di permukaan, tetapi juga menelusuri akar permasalahan yang bersifat lebih mendalam dan sistemik. Diagnosis yang tepat memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk merancang langkah-langkah strategis yang sesuai dan efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ainaya Alfatihah, S.Tr.IP, yang merupakan anggota Bagian Tata Pemerintahan, diketahui bahwa capaian SPM di sektor Pekerjaan Umum selama beberapa tahun terakhir tergolong rendah. Namun, setelah dilakukan investigasi lebih lanjut, ditemukan bahwa rendahnya angka capaian tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kegagalan pelaksanaan program, melainkan kesalahan dalam penginputan data yang terjadi pada situs e-SPM. Miskonsepsi dalam memahami cara pengisian data di situs e-SPM menyebabkan angka capaian terlihat lebih rendah dari kondisi yang sebenarnya. Proses penginputan data yang keliru ini menjadi akar permasalahan utama yang harus segera diatasi.

Bapak Rapinorrahman, M.IP, Sekretaris Bappelitbangda, juga menambahkan bahwa pengumpulan data yang akurat dan valid sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih baik. Penggunaan data yang salah hanya akan memperburuk kesalahan dalam pelaporan, yang pada akhirnya memengaruhi evaluasi dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun kesalahan teknis dalam pengisian data telah diperbaiki setelah klarifikasi dan pelatihan teknis dilakukan, tantangan yang lebih besar tetap ada dalam pelaporan yang akurat dan pemenuhan target SPM secara nyata di lapangan.

### **3.2. Guiding Policy / Kebijakan Penuntun**

Setelah tantangan diidentifikasi, langkah selanjutnya dalam strategi yang baik adalah merumuskan kebijakan penuntun atau guiding policy. Dalam penelitian ini, guiding policy diartikan sebagai pendekatan strategis yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai masalah yang telah diidentifikasi dan untuk mencapai capaian SPM yang lebih baik dan optimal. (Osirinda & Delis, 2016).

Hasil wawancara dengan Bapak Supranoto, ST, Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, menyebutkan bahwa meskipun kebijakan pusat seperti UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 2 Tahun 2018 memberikan gambaran umum mengenai implementasi SPM, Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum memiliki Peraturan Bupati (Perbup) yang secara khusus mengatur pelaksanaan SPM di daerah. Sebagai gantinya, kebijakan yang ada lebih mengandalkan rencana aksi yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan program.

Meskipun rencana aksi tersebut mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapainya, penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengembangkan Peraturan Bupati yang dapat lebih spesifik dan operasional dalam mengimplementasikan SPM di daerah. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat lebih terstruktur dan terarah untuk mencapai capaian yang lebih optimal.

### **3.3. Coherent Action / Tindakan Koheren**

Setelah merumuskan guiding policy, langkah berikutnya adalah tindakan koheren atau coherent action, yang merujuk pada langkah-langkah strategis yang diambil untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Tindakan koheren ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil oleh berbagai pihak terkait dapat dilakukan dengan sinkron dan terkoordinasi, serta memiliki dampak nyata dalam pencapaian SPM.

Dalam upaya mengatasi tantangan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelayanan air bersih dan sanitasi lingkungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kolaborasi ini mencakup program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang bertujuan untuk mewujudkan desa ODF (Open Defecation Free) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Keberhasilan program STBM sangat bergantung pada sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, masyarakat, dan mitra terkait. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berperan dalam penyediaan infrastruktur sanitasi yang layak, sementara Dinas Kesehatan berfokus pada edukasi dan perubahan perilaku masyarakat untuk mengurangi praktik buang air besar sembarangan. Kerjasama ini menandakan tindakan koheren yang dilakukan untuk mengatasi salah satu tantangan terbesar dalam mencapai SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Hasil dari evaluasi dan implementasi strategi optimalisasi SPM menunjukkan kemajuan signifikan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diselesaikan. Peningkatan capaian SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2024 menunjukkan angka capaian 100%, yang mencerminkan bahwa strategi yang diterapkan telah efektif. Koordinasi lintas sektor, pendekatan berbasis data, dan pelatihan yang dilakukan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Namun, meskipun sudah ada kemajuan, tantangan terkait keterbatasan jumlah pegawai, perubahan kebijakan yang terus berubah, dan keterbatasan sumber daya tetap menjadi penghalang. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM, penyesuaian kebijakan yang lebih konsisten, serta koordinasi yang lebih baik antar instansi untuk memastikan bahwa capaian SPM dapat lebih berkelanjutan dan optimal dalam jangka panjang.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian ini mengungkapkan temuan penting mengenai tantangan besar dalam implementasi SPM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Meskipun temuan-temuan sebelumnya telah memberikan wawasan mengenai pengelolaan SPM di sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan, penelitian ini menyajikan kenyataan yang lebih kompleks dan menantang asumsi yang ada. Salah satu temuan utama adalah rendahnya capaian SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang signifikan, tantangan terbesar masih terletak pada pengelolaan data dan koordinasi antarinstansi.

Temuan Adhi & Ningsih (2020) tentang manajemen data SPM di rumah sakit memberikan gambaran yang sangat relevan dengan hasil penelitian ini. Penelitian Adhi & Ningsih menekankan pentingnya pengelolaan data untuk mencapai SPM yang efektif. Temuan ini dapat

diterima karena menekankan bahwa pengelolaan data yang akurat sangat penting dalam pelaksanaan SPM. Namun, dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kesalahan dalam pengisian data yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyebabkan angka capaian terlihat lebih rendah daripada kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, meskipun temuan Adhi & Ningsih dapat diterima, kami menolak asumsi bahwa masalah hanya terletak pada manajemen data dan menekankan bahwa kesalahan teknis dalam penginputan data juga berhubungan dengan kurangnya pemahaman tentang sistem pelaporan.

Selanjutnya, penelitian Kalele et al. (2023) yang membahas efektivitas SPM di sektor pendidikan di Sulawesi Utara mengungkapkan bahwa koordinasi antarinstansi dan pengawasan adalah kunci keberhasilan implementasi SPM. Temuan ini dapat diterima dan dikuatkan oleh penelitian ini, yang menemukan bahwa koordinasi antarinstansi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi faktor yang sangat penting. Namun, temuan ini juga menolak ide bahwa koordinasi yang baik sudah cukup untuk mengatasi tantangan yang ada. Keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah membuktikan bahwa koordinasi antarinstansi harus disertai dengan penguatan sumber daya dan alokasi anggaran agar dapat mengoptimalkan capaian SPM.

Penelitian oleh Asyulia & Priyo Hastono (2023) yang menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige dalam menganalisis kinerja pelayanan kesehatan sangat relevan dengan penelitian ini. Mereka menemukan bahwa kepemimpinan, perencanaan strategis, dan manajemen proses adalah elemen utama dalam pencapaian SPM. Temuan ini dapat diterima dan memperkuat argumen penelitian ini bahwa perencanaan strategis sangat diperlukan dalam optimalisasi SPM. Namun, penelitian ini menolak pendapat bahwa hanya perencanaan strategis yang cukup untuk mengatasi tantangan di lapangan. Keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang tidak memadai harus menjadi perhatian utama, karena ini adalah hambatan besar yang menghalangi pencapaian SPM secara maksimal.

Penelitian Mardianingsih et al. (2020) yang mengkaji capaian SPM di RSUD Manokwari berfokus pada pengelolaan waktu dan sumber daya manusia di sektor kesehatan, namun tidak membahas peran teknologi dalam pengelolaan SPM. Temuan ini diterima karena pengelolaan sumber daya manusia memang menjadi salah satu tantangan utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Namun, kami menolak pandangan yang hanya fokus pada sumber daya manusia tanpa memperhitungkan pentingnya teknologi dalam pengelolaan SPM. Integrasi teknologi menjadi aspek yang krusial dalam memperbaiki sistem pelayanan di sektor Pekerjaan Umum, karena penggunaan teknologi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan.

Kusuma et al. (2024) dalam studi kasus mereka mengenai SPM pendidikan menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga dan ketersediaan fasilitas sangat mempengaruhi pencapaian SPM. Temuan ini dapat diterima, namun penelitian ini menolak asumsi bahwa koordinasi antar lembaga sudah cukup untuk mengatasi semua tantangan. Kami menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan fasilitas yang kurang memadai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperlambat pencapaian SPM. Oleh karena itu, selain koordinasi antar lembaga, peningkatan anggaran dan fasilitas juga diperlukan untuk mendukung implementasi SPM secara optimal.

Gaffar et al. (2024) berfokus pada penerapan SPM kesehatan untuk penderita Diabetes Mellitus di RSUD Otanaha Kota Gorontalo dan menekankan pentingnya komunikasi antar organisasi serta fasilitas yang memadai dalam pencapaian SPM. Temuan ini dapat diterima, namun penelitian ini menolak pandangan yang hanya mengandalkan komunikasi dan fasilitas

fisik dalam pencapaian SPM. Dalam konteks Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tantangan terbesar justru terletak pada interoperabilitas sistem, integrasi data, dan keterbatasan teknologi yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi SPM.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini menerima sebagian besar penelitian terdahulu sebagai landasan teori dan kerangka analisis, namun juga menolak beberapa asumsi optimis yang ada dalam temuan tersebut. Penelitian ini mengingatkan kita bahwa kondisi lokal dan tantangan praktis di lapangan sangat menentukan keberhasilan implementasi SPM, terutama dalam sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Koordinasi antar instansi, kepemimpinan yang kuat, dan perencanaan strategis memang penting, namun pengelolaan anggaran, ketersediaan teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai juga harus diperhatikan secara lebih serius. Pendekatan lapangan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan holistik, yang menambahkan kedalaman pada pemahaman mengenai penguatan tata kelola SPM dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai pelayanan dasar yang optimal.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai optimalisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, beberapa hal penting dapat disimpulkan. Pertama, pelaksanaan SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih jauh dari target optimal. Capaian SPM pada sektor ini di tahun 2023 tercatat hanya 66,54%, menunjukkan bahwa masih terdapat banyak tantangan dan hambatan yang harus diatasi dalam implementasi pelayanan dasar.

Penelitian ini menemukan bahwa penguatan tata kelola SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang perlu dilakukan secara holistik dan terintegrasi. Dalam konteks ini, diagnosis masalah yang ditemukan mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan keterbatasan anggaran untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan. Koordinasi antar perangkat daerah yang tidak maksimal menjadi faktor utama yang menghambat pencapaian SPM secara keseluruhan.

Namun demikian, terdapat upaya strategis yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah, seperti pembentukan forum koordinasi yang melibatkan instansi terkait dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sosialisasi. Meskipun ada kemajuan, seperti tercapainya 100% pada sektor tertentu seperti sanitasi, tantangan besar tetap ada, terutama dalam perencanaan anggaran, ketersediaan data akurat, dan implementasi program secara merata di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, optimalisasi capaian SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah memerlukan pendekatan yang lebih strategis, terstruktur, dan kolaboratif, dengan memperhatikan keterbatasan yang ada serta memperkuat koordinasi antar instansi untuk memastikan pelayanan dasar yang terpenuhi secara optimal bagi seluruh masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian** Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama terkait dengan waktu, cakupan wilayah, dan sumber data. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga temuan yang ada belum dapat digeneralisasi untuk daerah lain

yang mungkin menghadapi tantangan serupa. Selain itu, akses terbatas menyebabkan tidak semua aktor kunci seperti pejabat provinsi, pengusaha, dan kelompok rentan lainnya dapat diwawancarai secara langsung, yang membatasi kedalaman analisis terhadap dinamika pengelolaan SPM di tingkat daerah.

Keterbatasan lainnya adalah kurangnya data yang komprehensif mengenai implementasi SPM di sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang mempengaruhi hasil evaluasi kebijakan yang ada. Data yang diperoleh masih belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan, karena adanya kesalahan pengisian data yang sempat menghambat proses pelaporan dan evaluasi capaian SPM.

**Arah Masa Depan Penelitian (Future Work)** Penelitian lanjutan sangat disarankan untuk memperluas pemahaman mengenai dinamika pengelolaan SPM di daerah lain yang juga menghadapi tantangan serupa dalam sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara komparatif antara Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan daerah lainnya yang tengah mengimplementasikan SPM, untuk mengidentifikasi pola umum dan perbedaan yang muncul dalam penerapan SPM di berbagai wilayah. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang lebih holistik tentang kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan SPM di Indonesia, serta solusi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, dan kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga kepada narasumber, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, informasi, dan wawasan yang sangat berarti bagi kelancaran penelitian ini.

Tanpa bantuan dan kerja sama dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhi, S. N., & Ningsih, K. P. (2020). Manajemen Data Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit The Hospital Minimum Service Standard Data Management Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Tu. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 3(2), 53–62. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v3i2.6288>
- Asyulia, R., & Priyo Hastono, S. (2023). Determinan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terkena HIV dengan Pendekatan Malcolm Baldrige di Puskesmas Kota Depok Tahun 2022. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 5246–5266. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.12927>
- DENG, X. (2025). Asset Management of Smart Grid Using Digital Twin Technology and Machine Learning Algorithms. *Scalable Computing*, 26(2), 871–879. <https://doi.org/10.12694/scpe.v26i2.4048>
- Gaffar, N. A., Jafar, N., & Nurlinda, A. (2024). Capaian Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penderita Diabetes Mellitus Di RSUD Otanaha Kota Gorontalo, 5(1), 350–359. <https://doi.org/10.52103/jahr.v5i1.1796>

- Kalele, J. V. D., Tasik, F., & Kawung, E. (2023). Efektivitas Standar Pelayanan Minimal Pada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosioekonomi*, 19(2), 1081–1090. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.v19i2.48382>
- Kusuma, A., Yamin, A., & Dewi, G. (2024). Impelementasi Kebijakan dan Capaian Kinerja Pelayanan Publik (Studi Kasus pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa). *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1208–1218. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3857>
- Lazoğlu, Ç., & Karabey, U. (2025). Optimizing insurance investments: The role of liquidity risk in asset-liability management. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 470(May), 116636. <https://doi.org/10.1016/j.cam.2025.116636>
- Mao, Z., & Zhu, Y. (2025). Does e-government integration contribute to the quality and equality of local public services? Empirical evidence from China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 41599. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04539-y>
- Mardianingsih, N., Utami, F. A., & Palupi, I. R. (2020). Capaian standar pelayanan minimal gizi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari Papua Barat. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 16(4), 152. <https://doi.org/10.22146/ijcn.42425>
- Morte-Nadal, T., & Esteban-Navarro, M. Á. (2025). Recommendations for digital inclusion in the use of European digital public services. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 41599. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04576-7>
- Nurdin, M., & Hartati, N. (2019). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial dan kebijakan*. Penerbit Universitas Terbuka.
- Osrinda, N., & Delis, A. (2016). Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran serta Implikasinya terhadap Capaian Target Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 151–162. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i3.3517>
- Prabowo, Hadi (2022) *Birokrasi dan Pelayanan Publik*. 1 ed. Bimedia Pustaka Utama, Padalarang-Bandung Barat.
- Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tasatanattakool, P., Wannapiroon, P., & Nilsook, P. (2025). System Architecture of Digital Asset Management With AI Trism. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 103(2), 412–427. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10532376>